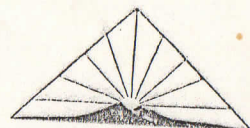


DEMOKRASI UNTUK INDONESIA

OLEH
HASAN MUHAMMAD TIRO



PENERBIT SEULAWAH

ATJEH

ISI BUKU

| Pasal | halaman |
|----------------------------------|---------|
| Sepatah Kata Pengantar | i |

BAGIAN PERTAMA

| | |
|---|----|
| I. Persoalan Jang Kita Hadapi | 1 |
| II. Djawaban Sukarno dan Kesalahannja | 6 |
| III. Djawaban Penulis dan Alasan-alasannja | 29 |
| A. Falsafah Negara Tidak Berdasarkan Falsafah Hidup Rakjat | 29 |
| B. Pemaksaan Negara Kesatuan Atas Satu Bangsa Bersuku | 72 |

BAGIAN KEDUA

| | |
|---|-----|
| IV. Negara Persatuan dan Kebaikannja | 96 |
| A. Pembagian Daerah Pemerintahan | 100 |
| B. Dasar Pemilihan Umum | 140 |
| C. Dewan Perwakilan Rakjat | 148 |
| D. Pembagian Kekuasaan dan Ketentuan- ketentuan Lain | 157 |
| V. Penutup | 179 |

Sepatah kata pengantar baru
untuk buku
Demokrasi Untuk Indonesia

9 AGUSTUS, 1991

Jang sebaik-baiknja ialah buku ini ditulis kembali atau sekurang-kurangnja diperbaharui, sebab banjak sekali perobahan jang sudah terdjadi di Indonesia sedjak buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1958, tiga-puluh-tiga tahun jang silam. Pada waktu ini saja tidak mempunjai waktu untuk itu. Mudah-mudahan akan ada kesempatan dihari-hari jang akan datang.

Diantara perobahan2 jang sudah terdjadi itu, misalnja, saja sendiri tidak pertjaja lagi pada 'Indonesia' sebagai satu bentuk negara jang kekal, atau satu kebangsaan jang sesungguhnya dan dapat diterima, sebab Indonesia sudah mendjadi satu keradjaan pendjadjahan Djawa. Oleh karena itu pula maka saja sudah pulang kembali ke kampung-halaman sendiri, ketempat tumpah darah nenek-mojang, ke tanah tempat saja dilahirkan, ke tanah pusaka asli, ke urat dan akar jang tidak bisa diljabut, kepada kepribadian Atjeh jang tidak berubah-obah, kepada Sedjarahnja dimasa silam sebagai penunjuk djalan kemasa depan. Sedjarah Atjeh tidak bisa diperhentikan atau dibelokkan karena imperialisme Djawa menghendaki demikian, sebagaimana Sedjarah Atjeh tidak pernah diperhentikan walaupun imperialisme Belanda menghendakinja dahulu.

Akibat dari perobahan2 diatas maka istilah 'bangsa Indonesia' dan istilah 'suku bangsa' jang saja pakai berulang kali dalam buku Demokrasi untuk Indonesia tidak dapat dipakai lagi sekarang sebab sudah njata dan sudah terbukti bahwa kaum imperialis Djawa hanja memakai istilah2 itu untuk penipuan politik: guna memudahkan mereka menundukkan bangsa2 jang bukan Djawa untuk menerima apa jang achirnja mendjadi pendjadjahan Djawa. Istilah 'kebangsaan Indonesia' dipakai sebagai topeng untuk menutup muka sipendjadjah Djawa dan kaki-tangannja; istilah 'suku-bangsa' dipakai untuk memperketjil bangsa2 lain, jang sebenarnya mempunjai hak untuk menentukan nasib diri-sendiri, supaja mereka mau tunduk kebawah pendjadjahan bangsa Djawa dengan tidak melawan. Kenjataan politik hari ini ialah bahwa apa jang disebut 'Republik Indonesia' itu adalah Keradjaan Pendjadjahan Djawa jang telah menggantikan Keradjaan Pendiadjaan Belanda; dan apa jang dinamakan 'suku bangsa' adalah anak-djadjahan bangsa Djawa jang boleh diperlakukan oleh pembesar2 Djawa sesuka hati mereka, atau paling tinggi warganegara klas tiga dari 'Republik Indonesia'.

Semua perkembangan ini sudah diramalkan dalam buku Demokrasi untuk Indonesia lama sebelum terdjadi. Demikian tepatnja kupasan2 itu sehingga bagi mereka jang sudah membatjanja maka tidak ada lagi jang mengherankan bila melihat 'Republik Indonesia' sudah mendjadi Keradjaan Kolonialis Djawa.

Kata2 terachir dari buku Demokrasi untuk Indonesia memperingatkan pembatja dalam tahun 1958, tiga-puluh tiga tahun jang silam:

"Djalan jang harus kita tempuh kiranja sudahlah terang-benderang: mendirikan satu negara jang adil, jang tjolok dengan keadaan bumi, masjarakat, agama, dan kebangsaan Indonesia sebagai suatu bangsa bersuku (jang dimaksudkan: berbilang bangsa!), jang berdasarkan demokrasi jang sehat, jang dapat menegakkan keadilan diantara perseorangan dan diantara golongan-golongan, jaitu satu negara persatuan (jang dimaksud: satu negara federasi!)

Tetapi seandainya Sukarno dan kawan2nja berkeras pula menentang pelaksanaan keadilan ini, maka tidak ada djalan lain jang terbuka bagi bangsa-bangsa Indonesia di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Pasundan, Madura dan sebagainya melainkan meninjau kembali kedudukan dan 'status' mereka serta apa jang telah terdjadi atas hak luhur dan hak mutlak mereka untuk memerintah diri sendiri jang dijamin oleh Piagam Perserikatan Bangsa2."

Inilah peringatan pendahuluan dari kedatangan Angkatan Atjeh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, ds. Sebagaimana telah terdjadi, pimpinan bangsa Djawa telah menolak usul2 jang saja kemukakan dalam buku itu. Bukunja dilarang batja dan siapa jang memilikinja diantjam hukuman 5 tahun pendjara oleh Djaksa Agung Indonesia. Sebagaimana sudah terdjadi pula, Pernjataan ATJEH MERDEKA terdjadi pada 4 Desember, 1976. Dalam sedjarah tidak ada sesuatu jang terdjadi dengan tiba2. Dan tiap2 kedjadian ada sebab2nja.

Harun di Lince

BAGIAN PERTAMA

I

PERSOALAN JANG KITA HADAPI

Kata pengantar Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia antara lain telah menjatakan: "Perdjungan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada sa'at jang berbahagia dengang selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negera Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Tetapi dewasa ini, tiga-belas tahun kemudian, *kenjataannya* ialah bahwa negara jang kita dirikan itu bukan sadja tidak bersatu tetapi makmurpun bukan dan adilpun tidak. Kita telah berhasil mentjapai kemerdekaan, tetapi sebagai suatu bangsa, kita telah gagal dalam memerintah diri sendiri. Selama tiga-belas tahun ini, negara kita telah mengalami keruntuhan kabinet sampai 17 kali, djadi rata-rata satu kabinet tidak tahan satu tahun lamanja. Persatuan kita jang begitu kuat dimasa permulaan kemerdekaan, kini telah rusak-binasa; perang saudara dengan korban jang berlipat ganda banjaknja dibandingkan dengan korban jang djatuh dalam peperangan dengan Belanda, telah berkobar terus-menerus sedjak bertahun-tahun disebagian besar tanah air. Ratap-tangis dari anak jang kehilangan bapa, dari wanita jang kehilangan suami, dan seruan-seruan dari suku-suku bangsa jang bersangkutan, tidaklah

mendapat perhatian Pemerintah Pusat jang membangga-
banggakan kekusaannya. Tidak, malah Pemerintah
Pusat sama sekali tidak mau mengakui adanya perang
saudara ini, seakan-akan jang dibunuhnja di Sumatera,
Pasundan, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku itu bukanlah
bangsanja sendiri, tetapi suatu djenis baru jang
dinamakannya "gerombolan" jang tiada mempunyai hak
dan boleh dibunuh demikian sadja. Mereka jang
memerintah di Djakarta rupanja lupa bahwa negara
dan pemerintahan adalah didirikan untuk keamanan dan
kesedjahteraan rakjat. Negara dan pemerintahan tidaklah
mempunyai kepentingannya sendiri diatas kepentingan
rakjat atau terlepas dari kepentingan rakjat. Bila
suatu negara dan pemerintahan tidak lagi melajani
kesedjahteraan rakjat, maka rakjat berhak menghapuskan
atau menukar negara dan pemerintahan itu dengan suatu
negara dan pemerintahan baru.

Ktika ditahun 1954 penulis mengadjukan kepada
Perserikatan Bangsa-bangsa soal pembunuhan dan
pelanggaran hak-hak asasi manusia Indonsia oleh
pemerintah Sastroamidjojo, maka Sastroamidjojo dan
kawan-kawannya sudah mentjoba menutup dosanja itu
dengan memperketjil arti pemberontakan-pemberontakan
jang sedang berketjamuk diseluruh Indonesia, dengan
mengatakan bahwa pemberontakan-pemberontakan itu
hanja sebagai akibat dari perbuatan beberapa orang
jang "gila pangkat" sadja. Andaikata pemberontakan-
pemberontakan jang telah dan sedang terdjadi terhadap

Pemerintah Pusat di Pasundan, Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi dan Maluku itu adalah karena perbuatan
perseorangan belaka, maka sesungguhnya pemberontakan-
pemberontakan itu sudah lama dapat dipatahkan oleh
Pemerintah Pusat dengan persendjataannya jang
serba lengkap itu. Tetapi semua kita mengetahui
bahwa pemberontakan-pemberontakan itu bukanlah
pemberontakan perseorangan, tetapi pemberontakan
umum dari rakjat di daerah-daerah tersebut jang merasa
diri mereka diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah
Pusat di Djakarta.

Lebih 180 tahun jang silam, Edmund Burke, ahli
negara Inggeris jang ternama itu, tlah menulis: "Bila
perasaan tidak puas sudah mendjalar, sangat luasnja
dikalangan rakjat, maka sebaiknjalah diakui bahwa ada
sesuatu kesalahan dalam Undang Undang Dasar negara
atau dalam tindakan pemerintah. Rakjat tidaklah
mempunyai keuntungan dalam kekatjauan. Kalau mereka
berbuat salah, itu adalah kechilafan dan bukan kedjahatan
mereka. Tetapi djauh bedanja dengan mereka jang
memerintah. Mereka jang memerintah pasti bisa
melakukan perbuatan salah dengan rentjana atau djuga
dengan tidak sengadja." ("When popular discontents
have been very prevalent, it may well be affirmed and
supported, that there has been generally something
found amiss in the Constitution, or in the conduct of
Government. The people have no interest in disorder.
When they do wrong, it is their error, and noth their

crime. But with the governing part of the State, it is far otherwise. They certainly may act ill by design, as well as by mistake." "Thoughts on the Cause of the Present Discontents," *Select Works*, halaman 6-7). Selanjutnya Edmund Burke mengutip utjapan seorang ahli negara Perantjis jang mengatakan: "Revolusi-revolusi jang terdjadi di negara-negara besar tidaklah disebabkan oleh sesuatu kebetulan sadja, atau oleh nafsu djahat dari rakjata 'Belum pernah rakjat dari suatu negara berontak oleh karena pemerintahnja lemah dan kutjar-katjir. Bagi rakjat, jang telah menggerakkan mereka buat berontak, bukanlah keinginan buat menjerang, tetapi kehilangan kesabaran buat menderita.'" ("Les révolutions qui arrivent dans les grands états ne sont point un effect du hazard, ni du caprice des peuples. Rien ne révolte les grands d'un royaume comme une Gouvernement foible et dérangé. Pour la populace, ce n'est jamais par envie d'attaquer qu'elle se soulève, mais par impatience de couffrir." *Select Works*, h. 7). Dan tidakkah pula Edouard Laboulaye telah mengatakan, bahwa "pemberontakan adalah usaha jang terachir sekali dari rakjat jang hak-hak mereka sudah dirampas oleh penindasan." (".....l'insurrection est l'ultima ratio des peuples que la tyrannie dépouille de leurs droits." *L'Etat et Ses Limits*, h. 31).

Apa jang sedang terdjadi dalam masjarakat kita sekarang adalah tepat sebagai gambaran diatas. Dan bahwa ada sesuatu kesalahan jang pokok jang telah terdjadi dalam lapangan kehidupan politik bangsa kita

adalah suatu hal jang menurut pendapat penulis pada umumnja sudah diakui oleh kita semua, walaupun belum ada perstudjuan pendapat tentang apakah jang sebenarnja kesalahan itu, dimanakah letaknja, dan siapakah jang harus dipertanggung-djawabkan atasnja.

II

DJAWABAN SUKARNO DAN KESALAHANNJA

Beberapa waktu jang lalu Sukarno telah tampil kemuka memberikan djawabannja tentang letak kesalahan jang telah terdjadi itu. Menurut Sukarno kesalahan itu terletak pada pemakaian "demokrasi Barat" sebagai dasar pemerintahan kita, jang menurut dia tidak sesuai dengan djiwa bangsa kita. Apakah jang dimaksudkan olehnja dengan pasti-pasti dengan istilah "demokrasi Barat" itu—suatu istilah jang dapat diberikan bermatjam-matjam tafsiran, — tidaklah ditegaskan oleh Sukarno jang sudah kebiasaan berpikir setjara *reductio ad absurdum* itu.

Bagi penulis djawaban Sukarno itu tidak dapat diterima berdasarkan alasan-alasan berikut: Demokrasi Barat—walaupun diberikan tafsiran apapun djuga, — dalam bentuknja jang sehat dan dalam djiwanja jang asli belumlah pernah didjalankan dibumi Indonesia oleh Sukarno dan kawan-kawannja. Apa jang sudah didjalankan di Indonesia selama 13 tahun merdeka ini ialah suatu tiruan jang murah dari *bentuk* susunan demokrasi-kulitnja sadja, —sedang isi jang sesungguhnya dari demokrasi itu tidaklah dipahami atau diabaikan. Paling mudjur apa jang selama ini didjalankan di

Indonesia adalah suatu demokrasi "primitive", demokrasi adu-angka jang hasilnja bukanlah pemerintahan dari seluruh rakjat, untuk seluruh rakjat, dan oleh seluruh rakjat, tetapi pemerintahan dari segolongan rakjat, untuk segolongan rakjat, dan oleh segolongan rakjat atas segolongan rakjat jang lain, tegasnja, pemerintahan oleh satu suku bangsa atas seluruh suku-suku bangsa Indonesia jang lainnja. Njatalah ini djauh dari perikeadilan jang harus mendjadi tudjuan tiap-tiap negara.

Demokrasi jang sehat dan dalam pengertiannja jang asli bukanlah pemerintahan dengan mengadu angka atau dengan suara terbanyak jang mutlak, tetapi *pemerintahan dengan persetujuan dari jang diperintahi*. Pemerintahan jang sedemikian ini, sebagaimana akan kita buktikan nanti, tidaklah dapat dilahirkan oleh demokrasi "primitive" jang kini didjalankan di tanah air kita, jang oleh Sukarno rupanja disangka sebagai "Demokrasi Barat" itu.

Djadi teranglah bahwa usaha Sukarno untuk melemparkan kesalahan-kesalahan jang telah dilakukan Pemerintah Pusat dibawah pengaruh dan pimpinannja sendiri keatas pundak demokrasi jang pada hakikatnja belum pernah didjalankan di Indonesia, tidaklah dapat diterima sama sekali. Dan utjapan-utjapan Sukarno bahwa demokrasi tidak tjotjok dengan djiwa bangsa Indonesia adalah utjapan-utjapan jang dungu, sesat dan menjesatkan. Malapetaka jang telah menimpa bangsa kita bukanlah disebabkan oleh karena kebanyakan

demokrasi, tetapi disebabkan oleh karena kekurangan demokrasi jang sesungguhnya.

Berdasarkan pada anggapan jang salah itu, Sukarno sudah maju selangkah lagi dengan mengemukakan apa jang dinamakan "konsepsi" (sic!) Sukarno itu, jang pada hakikatnja tidaklah mempunyai sangkut-paut dengan persoalan jang sebenarnya jang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, dan jang kalau diikuti djuga, akan semakin mendjauhkan kita dari persoalan jang sebenarnya dan dari penyelesaian jang kita butuhkan. "Konsepsi" Sukarno berisikan beberapa "pikiran" basi jang sudah ditolak orang diluar negeri, karena pengetahuan dan pengalaman sudah sama-sama membuktikan kesia-siaannja. Pikiran-pikiran basi ini sekarang dipungut oleh Sukarno dan disadjikan kepada kita sebagai suatu "konsepsi"-nja. Dalam istilah ilmu politik, suatu konsepsi ialah suatu buah pikiran jang lengkap,—bukan hanya beberapa kepingannja sadja,—jang udjung-pangkalnja diikat oleh ilmu manthiq (logika), jang keseluruhannja dapat berdiri sendiri, jang satu bagiannja tidak bertentangan dengan bagian-bagian lainnja, dan dapat memberi djawaban atas segala persoalan jang dihadapinja, dari soal jang terpokok kepada jang seketjil-ketjilnja dalam lapangan jang mendjadi atjaranja. Menurut ukuran ini dapatkah "konsepsi" Sukarno itu kita namakan sebagai suatu konsepsi sama sekali? Djauh panggang dari api!

"Konsepsi" Sukarno tidak lebih dari pada beberapa

kepingan atau petjahan pendapat-pendapat politik jang sudah basi, jang tidak mempunyai logika; satu bagiannja tidak mempunyai hubungan dengan bagian jang lain dan akibat dari satu bagiannja tidaklah terbimbing oleh akibat dari bagian-bagiannja jang lain. Keseluruhannja berbentangan dengan falsafah pemerintahan demokrasi dan pemerintahan ber—Undang Undang Dasar.

Untuk membuktikan ini, marilah kita menindjau "konsepsi" Sukarno ini walaupun setjara sepintas lalu. Bagian jang terpenting dari pada "konsepsi" ini ialah pembentukan suatu "Dewan Nasional" jang pekerdjaannja memberi nasihat kepada Pemerintah "diminta atau tidak". Anggota-anggotanja dipilih oleh Sukarno, bukan oleh rakjat. Dasar pemilihannja ialah pekerdjaan, bukan ideologi, bukan daerah, dan bukan djumlah rakjat jang diwakili.

Banjaklah pertanjaan jang dapat kita madjukan mengenai susunan ini, umpamanja: *pertama*, kalau pekerdjaan dewan ini hanya untuk menasehati Pemerintah, sedang Pemerintah sama sekali tidak terikat dengan nasihat-nasihatnja, maka buat apakah dewan ini diadakan? Negara dan Pemerintah adalah lembaga kekuasaan jang kekuasaannja ditentukan dalam Undang Undang Dasar. Dewan-dewan jang tidak mempunyai kekuasaan tidaklah dapat digolongkan dalam lembaga kenegaraan. Pembentukan dewan-dewan liar jang tidak mempunyai dasar-dasar hukum ini akan mengaburkan peranan lembaga-lembaga kekuasaan negara jang sah

dan mengatjaukan pertumbuhan pemerintahan jang berdasarkan perwakilan di tanah air kita. Selain dari itu merupakan pemborosan keuangan negara jang tidak bisa dipertanggung-djawabkan. *Kedua*, kalau Republik Indonesia adalah suatu negara hukum jang ber-Undang Undang Dasar, maka pasal manakah dari Undang Undang Dasar itu jang telah memberikan kekuasaan kepada Sukarno untuk mengadakan dan memilih anggota-anggota "Dewan Nasional" itu? Dan pasal manakah pula jang telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang pilihan Sukarno ini untuk "menasehati", atau lebih tepat untuk *mempengaruhi* Pemerintah dengan pendapat-pendapat perseorangan mereka sendiri dengan tiada pemberian kekuasaan dari rakjat? Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tidaklah memberikan kekuasaan jang demikian itu baik kepada Sukarno ataupun kepada dewan-nja. Njatalah perbuatan Sukarno itu bukan sadja diluar hukum, tetapi djuga melanggar moral falsafah ketatanegaraan jang ber-Undang Undang Dasar. Dalam negara demokrasi pelaksanaan kekuasaan negara dilakukan melalui lembaga-lembaga kekuasaan negara seperti Dewan Perwakilan Rakjat, Senat, Mahkamah Agung, dan sebagainya, untuk mentjegah kekuasaan perseorangan. Dengan sendirinja harus didjaga pula agar lembaga-lembaga kekuasaan negara itu tidak dipengaruhi oleh orang-orang jang tidak mendapat kekuasaan dari rakjat. Oleh karena itulah maka segala sesuatu mengenai dewan perwakilan, seperti siapa jang boleh dipilih dan

memilih, dimana dan bagaimana memilihnja, semuanya dikendalikan dengan Undang Undang sehingga hanja mereka jang sudah diberi hak oleh rakjatlah jang patut mempengaruhi djalannja pemerintahan. Dalam negara demokrasi anggota dari dewan-dewan jang bersifat perwakilan, jang dengan sendirinja merupakan salah-satu dari pada lembaga-lembaga kekuasaan, haruslah dipilih oleh rakjat, karena rakjatlah jang dipandang sebagai sumber segala kekuasaan pemerintahan. Tetapi wakil jang sah hanja bisa dipilih oleh orang jang mewakilkanja. Wakil rakjat hanja bisa dipilih oleh rakjat sendiri dan bukan oleh seorang Ir. Sukarno umpamanja. Oleh karena itu bukan suatu kebetulan, kalau Sukarno telah mengisi "Dewan Nasional"-nja dengan boneka-bonekanja sendiri pula.

Ketiga, kalau dasar pemilihan anggota-anggota "Dewan Nasional" itu adalah pekerdjaan ("functional representation") sebagai Sukarno gemar sekali menerangkannja, bukankah seharusnya paling kurang 80% dari anggota dewan itu mestinja terdiri dari golongan petani, mengingat kenjataan bahwa sekurang-kurangnya 80% pekerdjaan rakjat Indonsia masih bertani? Tetapi sebagai ternjata, petani Indonesia tidaklah diberikan suara jang seimbang dengan djumlah mereka. Sebenarnja pidato-pidato mengenai perwakilan berdasarkan pekerdjaan itu adalah omong-kosong belaka selama ekonomi kita masih belum berubah dari ekonomi tani ke ekonomi industri jang akan menimbulkan perbedaan pekerdjaan itu. Rupanja inilah jang tidak dipahami oleh Sukarno.

Perwakilan berdasarkan pekerdjaan memerlukan beberapa latar-belakang untuk dapat mendjalankannya. Latar-belakang jang terpenting ialah adanya *pembedaan* jang tadjam diantara bermatjam-matjam lapangan pekerdjaan sehingga seseorang tidak dapat mengobah lapangan pekerdjaannya atau berpindah dari satu lapangan pekerdjaan kelapangan pekerdjaan jang lain dengan mudah. Hal jang sedemikian ini hanya dapat terdjadi dalam suatu masjarakat jang sudah berekonomi industri, dimana tiap-tiap lapangan pekerdjaan memerlukan keahlian, dan keahlian ini berakar pula pada sekolah dan latihan jang bertahun-tahun. Oleh karena tidak ada satu orang jang dapat mendjadi ahli dalam segala lapangan, maka tiap-tiap orang, disukainya atau tidak, terpaksa tetap pada lapangannya masing-masing, karena berpindah-pindah lapangan pekerdjaan itu sudah terang merugikan dirinya sendiri karena seseorang tidak akan dapat bersaing dengan orang lain dalam lapangan lain jang bukan lapangan keahliannya. Walaupun seseorang mau menukar-nukar pekerdjaannya, umpamanya, numun ia tidak akan diterima dalam lapangan lain itu dengan kedudukan jang baik karena ia bukan seorang ahli dalam lapangan itu. Dengan sendirinya dalam masjarakat jang sudah ber-ekonomi industri, segala lapangan pekerdjaan mendjadi teratur dan satu lapangan pekerdjaan dengan lapangan pekerdjaan jang lain sangat dibeda-bedakan. Keadaan inilah jang dalam istilah ilmu sosiologi politik

dinamakan rangka-peranan ("role structure"). Pengaruh rangka-peranan ini dapat kita lihat dengan mudah dalam negara-negara jang sudah berekonomi industri seperti Eropah Barat, dan Amerika Utara. Maka kita lihatlah dalam negara-negara ini betapa tadjamnya perbedaan rangka-peranan itu. Tiap-tiap lapangan pekerdjaan, baik lapangan sosial, politik, ekonomi, perdagangan, ketabiban, hukum, ketenteraan dan sebagainya, semuanya mendjadi lapangan jang memerlukan keahlian. Untuk memasuki tiap-tiap lapangan pekerdjaan itu perlu pendidikan perguruan tinggi jang lama. Tambahan lagi tiap-tiap rangka-peranan ini diatur dan berorganisasi sendiri-sendiri. Segala sesuatu terletak pada tempatnya karena tiap-tiap orang bekerdja dalam lapangan keahliannya masing-masing. Dengan demikian perpindahan dari satu lapangan pekerdjaan kelapangan pekerdjaan jang lain hampir-hampir tidak mungkin. Akibat dari semua ini ialah timbulnya ketenteraman umum dalam segala lapangan: ekonomi, politik dan masjarakat. Inilah latar-belakang jang diperlukan untuk dapat mendjalankan perwakilan jang berdasarkan pekerdjaan itu.

Sekarang marilah kita lihat susunan rangka-peranan ini dalam masjarakat kita. Pada umumnya masjarakat kita masih satu masjarakat tani dimana sebagian besar rakyat masih buta-huruf. Kalau kita menilik kedalam masjarakat kita, maka, *pertama*, kita dapati bahwa rangka-peranan atau pembedaan lapangan pekerdjaan itu hampir-hampir tidak ada, atau kalau ada, hanya

sedikit dan dalam lapangan jang terbatas sekali, misalnja dalam lapangan ketabiban. Tetapi walaupun disini, dokter-dokter kita jang sedikit itu masih ditandingi oleh dukun-dukun dan tukang-tukang djamu kita jang djumlahnja djauh berlipat ganda dari djumlah dokter-dokter itu. Demikian djuga misalnja dalam lapangan hukum. Ahli-ahli hukum kita jang berdjumlah terbatas itu disaingi lapangan pekerdjaannya oleh pokrol-pokrol bambu jang djumlahnja berlipat-ganda pula. Untuk dapat mentjari penghidupan dalam susunan ekonomi masjarakat kita, orang tidak memerlukan keahlian sebagaimana dalam masjarakat industri. Keadaan ini mendjalar dalam segala lapangan, termasuk djuga lapangan politik. Maka kita lihatlah umpamanya seseorang dapat mendjadi pemuka-pemuka partai politik, mendjadi Gubernur, mendjadi Menteri, bahkan mendjadi Wakil Perdana Menteri, asal panda membatja dan menulis sadja. *Kedua*, sebagai akibat dari pada tidak adanya batas antara rangka-rangka peranan itu atau diantara lapangan pekerdjaan itu, maka dalam masjarakat kita terdapat satu keadaan dimana pekerdjaan seseorang dianggap dapat diganti oleh seseorang jang lain dengan begitu sadja. Perpindahan pekerdjaan atau perpindahan djabatan dari satu lapangan ke lapangan jang lain dapat dilakukan dengan mudah. Seorang guru mendjadi djenderal, seorang kijaahi mendjadi Menteri, seorang insinjur mendjadi Perdana Menteri, adalah hal jang biasa dalam masjarakat kita. Hal ini dengan sendirinja merendahkan deradjat keahlian dalam tiap-tiap lapangan

jang memang sudah rendah itu. Dalam lapangan politik keadaan ni mempunjai pengaruh jang menggontjangkan karena memungkinkan djatuhnja kekuasaan negara ketangan orang-orang jang tidak mempunjai pengetahuan tentang ilmu pemerintahan; memperbesar lapangan merusak bagi orang jang tidak bertanggung-djawab; mendjadikan perkembangan politik tidak bisa diperhitungkan lagi dan menghilangkan kepertjajaan umum kepada negara. Oleh karena dasar dan sifat *pekerdjaan* itu demikian longgar dan tidak berketetapanja dalam masjarakat kita, maka mendasarkan perwakilan politik atas pekerdjaan sebagaimana diandjurkan oleh Sukarno sekarang, akan semakin memporak-perandakan ketertiban politik dalam negara kita.

Djadi njatalah bahwa dalam masjarakat kita sebagai satu masjarakat tani, lapangan pekerdjaan masih mempunjai dasar jang terlalu dangkal dan pada umumnja masih bersifat sementara sehingga "pekerdjaan" itu belum dapat didjadikan dasar perwakilan politik. Halnja sangat berlainan dengan masjarakat jang sudah berekonomi industri dimana lapangan pekerdjaan sudah mendjadi satu lapangan jang bersifat tetap dan kekal. Dalam hal ini kita tidaklah dapat berpura-pura. Kalau Sukarno benar-benar akan memaksakan pula pelaksanaan pikiran-pikiran mentahnja ini, maka dalam waktu jang singkat akan terbukti pula bahwa ini hanja merupakan satu tambahan baru lagi dari sekian banjak sandiwara politik bodoh jang dipaksakan oleh Sukarno atas pundak bangsa kita.

Sebenarnja perwakilan berdasarkan pekerdjaan itu baru dapat *dipertimbangkan* kalau ekonomi kita sudah bertukar dari ekonomi tani ke ekonomi industri. Walaupun perobahan ini dapat tertjapai pada suatu waktu, namun demikian belum tentu kalau perwakilan berdasarkan pekerdjaan itu akan lebih bermanfaat bagi kita dari pada perwakilan berdasarkan daerah. Bahkan kebanyakan negara-negara jang pernah mentjoba memakainja telah meninggalkan tjara perwakilan berdasarkan pekerdjaan itu, karena ternjata tidak memuaskan. Walaupun di Soviet Rusia jang tidak menghargai nilai-nilai demokrasi jang sebenarnja, pertjobaan memakai perwakilan berdasarkan pekerdjaan itu telah berachir dengan kegagalan. Tjara itu dipakai dalam Undang Undang Dasar Soviet Rusia tahun 1923, tetapi perwakilan berdasarkan pekerdjaan itu kemudian dihapuskan sedjak berlakunja Undang Undang Dasar tahun 1936 hingga kini. Perwakilan berdasarkan pekerdjaan tidak dapat didjalankan dengan adil karena sukarnja menentukan perbedaan kekuatan antara golongan-golongan; karena sifatnja perwakilan jang sematjam ini jang mengutamakan kepentingan golongan sendiri dan membesar-besarkan perbedaan dengan golongan pekerdjaan jang lain sehingga akibatnja persetudjuan lebih sukar tertjapai dibandingkan dengan perwakilan berdasarkan daerah; karena perwakilan berdasarkan pekerdjaan menghasilkan wakilwakil jang kebanyakannja ahli dalam satu lapangan sadja, yakni lapangannja masing-masing, dengan sendirinja berpemandangan sempit dan tidak tjotjok untuk

membuat undang-undang umum jang mengenai kepentingan seluruh rakjat. Dan achirnja, dalam perwakilan begni hubungan antara siwakil dengan sipemilihnja jang tersebar dimana-mana dan tidak mempunjai satu daerah kediaman itu, adalah terlalu djauh sehingga sukar untuk meminta pertanggungjanaan djawabnja. Tetapi walaupun demikian, Sukarno masih terus-menerus djuga membosankan kita, —barangkali dengan tiada disadarinja, —dengan pikiran-pikiran jang sudah basi ini.

Ke-empat, mungkin pula karena kekeliruan pahamnja tentang perwakilan berdasarkan pekerdjaan ini maka Sukarno telah memasukkan pula wakil-wakil dari Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian dan malah Kedjaksanaan, dalam "Dewan Nasional"-nja. Tidakkah Sukarno memahami apa perbedaannja antara anggota-anggota Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian, dengan anggota-anggota serikat sekerdja biasa jang bekerdja pada perusahaan-perusahaan perseorangan jang tidak dikuasaj negara? Apakah kalau kaum buruh dapat mogok, maka Angkatan Perang dan Polisi djuga berhak mogok? Angkatan Perang dan Kepolisian adalah alat-alat negara jang diamanahkan memegang monopoli alat kekerasan dari seluruh masyarakat dan bertugas untuk melindungi masyarakat itu dari bahaya-bahaya dari luar, dan untuk mentjegah djangan sampai dipakainja alat-alat kekerasan itu oleh sesuatu golongan untuk menindas golongan jang lain didalam negeri. Oleh karena itu falsafah demokrasi

menghendaki tunduknja kekuasaan tentera pada kekuasaan politik dan terpisahnja ketenteraan dan kepolisian dari lapangan politik. Dalam suatu negara demokrasi, ketenteraan dan kepolisian diletakkan dalam suatu ikatan hukum jang tegas sekali, jang mengendalikan dan memberikan ketentuan dalam segala gerak-geriknja. Kedalam negeri, tiap gerakan mereka, walaupun untuk menangkap seorang manusia, haruslah mendapat persetujuan dari mahkamah kehakiman; keluar negeri, tiap gerakan mereka haruslah dengan perintah dari kekuasaan politik jang tertinggi. Dalam kedua-dua lapangan, keluar dan kedalam, mereka tidaklah mempunyai kehendak, keinginan atau politiknya sendiri. Mereka adalah alat dari masyarakat jang harus mengabdikan kepada masyarakat dan tunduk kepada politik dan Hukum jang dikehendaki dan dibuat oleh masyarakat sebagai dlahirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Disaat mereka dengan sukarela mengangkat sumpah untuk mendjadi *alat* negara, maka berarti disaat itu pula mereka sudah mengangkat sumpah untuk tidak akan *memperalatkan* negara itu sendiri; dan ini berarti pula suatu sumpah untuk tidak mentjampuri lapangan politik, karena politik berarti perdjungan merebut kekuasaan negara untuk sesuatu tudjuan jang mungkin baik dan mungkin pula buruk. Tetapi perdjungan politik dalam sesuatu negara hanja bisa berlangsung setjara damai dengan satu sjarat, dan hanja satu-satunja; yakni dengan tidak terlibatnja anasir-anasir kekerasan, ja itu ketenteraan dan kepolisian, dalam lapangan politik itu. Djadi njatalah bahwa seluruh masa

depan demokrasi dan pemerintahan ber-undang-undang dasar jang teratur di Indonesia bergantung pada satu pertanyaan: sanggupkah ketenteraan dan kepolisian kita menempatkan dirinja diluar pertarungan politik antara partai-partai dan golongan-golongan, sebagai halnja ketenteraan dan kepolisian di negara-negara demokrasi jang lain di dunia, seperti di Inggeris, Amerika Serikat, Canada, Switserland, dan sebagainya? Berhasil atau gagalnja demokrasi di Indonesia akan lebih banjak bergantung pada kesanggupan atau ketiadaan kesanggupannya ketenteraan dan kepolisian kita untuk mendisiplin dirinja sendiri, dari pada kesanggupan atau ketiadaan kesanggupan rakyat untuk memilih wakil-wakil jang sepadan. Kesalahan jang mungkin dibuat oleh rakyat tidaklah menjintuh dasar-wasar kekuasaan negara dan lambat-laun dapat diperbaiki berangsur-angsur. Tetapi kesalahan jang mungkin dibuat oleh alat-alat kekerasan negara, oleh ketenteraan dan kepolisian, akan menggontjag dasar-dasar kekuasaan negara jang akan menimbulkan reaksi jang terus-menerus dan jang achirnja akan membuat negara kita suatu "republik batang pisang" ("banana republic") sampai ke achir zaman.

Akan tetapi kearah inilah sekarang negara kita sedang diseret oleh "konsepsi" Sukarno. Dengan dimasukkannya Angkatan Perang dan Kepolisian kedalam "Dewan Nasional", jang mana dalah satu badan politik, maka Sukarno telah menumbangkan dasar-dasar pemisahan kekuasaan, pembagian tugas, dan tanggung-djawab

dalam negara demokrasi. Dengan tindakan ini Sukarno telah menjeret ketenteraan dan kepolisian kedalam lapangan politik dan membuka djalan kepada pihak-pihak militer untuk mentjampuri politik dan achirnja menguasai negara, sebagaimana jang terdjadi di Djepang sebelum perang dunia ke II, dan jang kini sedang terdjadi di beberapa negara tetangga kita. Pada hakikatnja mereka ini tidak lain dari pada sedang mengulangi tragedi politik Amerika Selatan setapak demi setapak.

Kepada anggota-anggota ketenteraan dan kepolisian kita jang mempunyai tafsiran *pengabdian* kepada masyarakat itu dengan *mendikte* masyarakat itu sendiri, inginlah kita memperingatkan kenjataan sedjarah bahwa selama dunia berkembang belum pernah ada suatu pemerintahan diktator militer dapat membawa kemakmuran, keadilan dan ketenteraman kepada sesuatu bangsa. Pemerintahan diktator militer selalu berachir dengan pertumpahan darah, kekatjauan, keruntuhan, kemiskinan dan air mata. Hal ini disebabkan oleh karena pada dasarnya kaum militer mempunyai keuntungan dalam keadaan kekatjauan, paling tidak kalangan atasannya. Dalam keadaan damai, aman dan tenteram, kaum militer mendjadi tidak penting, tenaga mereka "tidak diperlukan, kemuliaan ("prestige") pekerdjaan mereka menurum dan dengan sendirinja keuntungan sosial dan ekonomi mereka berkurang pula. Dalam istilah ekonomi, kedudukan mereka dimasa damai dapat disamakan dengan pedagang-pedagang jang barang dagangannya tidak mempunyai

pasaran. ;Tetapi dalam keadaan kekatjauan, apalagi peperangan, kedudukan kaum militer, paling tidak golongan atasannya mendjadi penting lagi, kemuliaan pekerdjaan mereka dengan sendirinja mendjadi naik, dan keuntungan ekonomi mereka berlipat ganda oleh karena mereka dapat mengeluarkan bermacam-macam peraturan "darurat" dan mereka dapat pula mengambil bermacam-macam tindakan "darurat". Kedudukan kaum militer dalam waktu kekatjauan tidak ubahnja seperti pedagang-pedagang jang dengan tiba-tiba memperoleh pasaran besar bagi barang-barang dangangannya jang selama ini tidak dapat didjual.

Oleh karena itu kalau kaum militer diberi kesempatan untuk menentukan garis-garis politik negara, maka politik jang mereka djalankan dengan sendirinja ialah politik jang mereka djalankan dengan sendirinja ialah politik jang dapat mendjamin kedudukan dan kepentingan golongan mereka, dan ini berarti suatu politik dimana pemakaian kekerasan sendjata mempunyai kedudukan jang terpenting. Dalam negara-negara jang kuat dimana ketenteraman politik dalam negeri tidak bisa dikutak-katikan seperti di Djepang, Djerman, Italia dan sebagainya, politik kaum militer dengan sendirinja terpaksa ditudjukan keluar jang achirnja menmibulkan peperangan antara bangsa-bangsa; dalam negara-negara jang lemah jang dengan sendirinja tidak dapat menudjukan politik kekerasaannya keluar, seperti halnja dalam negara-negara Asia, Latin Amerika, dan Indonesia, maka politik militer ini bekerdja kedalam, menimbulkan bentrokan antara

partai dan golongan bahkan diantara berbagai bagian angkatan perang sendiri. Hal ini lebih-lebih dapat diperhatikan di Indonesia dimana pemain-pemain jang memegang peranan dalam pertjaturan politik ini masih sutji dari pengetahuan dan pengalaman politik, sehingga gerak-gerik dan tudjuan mereka tidak perlu diterka tetapi dapat dilihat dengan terang-benderang sadja. Maka kita lihatlah umpamanja djenderal-djenderal politik Sukarno dengan tidak malu-malu telah mengeluarkan saranan-saranan jang bahwa mereka menolak semua penjelesaian setjara perundingan dari perang saudara jung kini sedang terdjadi. Sudah tentu ini adalah persoalan politik jang berbahaja sekali kalau penentuannja diserahkan kepada kaum militer. Djenderal-djenderal politik Sukarno tentu mengetahui sebagaimana kita semuapun mengetahui bahwa mereka telah njata-njata tiada mempunjai kesanggupan untuk membuat rakjat jang berontak itu untuk "bertekuk lutut" kepada mereka selama delapan tahun jang silam. Dan apa jang tidak bisa dilakukan dalam waktu delapan tahun tidaklah akan dapat dilakukan dalam waktu jang singkat. Apa jang dimaui oleh djenderal-djenderal politik Sukarno dengan menentang penjelesaian perang saudara jang menjedihkan ini setjara semestinja-soal politik harus diselesaikan setjara politik! —tidak lain melainkan untuk mendjamin keutungan diri mereka sendiri, tegasnja pasaran bagi tenaga, mereka. Perang saudara jang terus-menerus berarti kekuasaan jang terus-menerus pula bagi djenderal-djenderal politik ini. Bagi mereka kakatjauan jang terus-menerus berarti

kekuasaan, kemegahan, kemuliaan dan kekajaan. Tetapi bagi rakjat kekatjauan jang terus-menerus ini berarti kematian, kemiskinan dan air mata.

Djenderal-djenderal politik Sukarno setjara pura-pura atau memang karena ketiadaan kesanggupan mereka untuk memahami persoalan politik dan kenegaraan, sering mengemukakan kepada kita se-akan-akan pertumpahan darah jang sudah terdjadi selama lebih delapan tahun ini bagi mereka hanja merupakan soal "keamanan" sadja. Pada hal inilah jang bukan! Apa jang sedang kita hadapi di Indonesia bukanlah soal "keamanan" jang dapat diselesaikan dengan menangkap orang-orang jang "menggangu keamanan" itu. Tidakkah delapan tahun kegagalan sudah tjukup untuk membuktikan kesesatan pendapat ini? Apa jang sedang kita hadapi ialah persoalan *politik* jang hanja bisa diselesaikan setjara politik pula. *Kalau Sukarno hari ini bersedia menjelesaikan persoalan politik ini setjara politik pula, maka besok pagi keamanan akan kembali diseluruh Indonesia.* Tetapi inilah jang tidak mau dimengerti atau memang tidak bisa dipahami oleh Sukarno dan djenderal-djenderal politiknya di Djakarta. Inilah salah satu akibat pula bila kaum militer turut menentukan garis-garis politik negara.

Djenderal Wavell telah menulis dalam bukunya *Tentera jang Baik*, antara lain: "Kemungkinan untuk menukar djabatatan antara seorang ahli-negara dengan seorang tentera...sudah berlalu untuk selama-lamanja sedjak abad jang silam. Orang Djerman sudah membuat

usaha peperangan sebagai suatu lapangan pekerdjaan jang tersendiri; dan pendapat-pendapat baru jang telah menambah kesulitan alat-alatnja telah membuat usaha peperangan itu suatu lapangan leahlian. Keadaannja serupa dengan politik jang sudah didjadikan suatu lapangan jang tersendiri oleh demokrasi. Tidaklah dapat lagi satu orang mengharapkan untuk mendjalankan kedua-duanja, walaupun kedua-duanja adalah tjabang dari satu pekerdjaan, jakni, memerintah manusia dan mengatur tata-tertib urusan kemanusiaan." ("Interchangeability between the statesman and the soldier passed for ever...in the last century. The Germans professionalised the trade of war; and modern inventions, by increasing its technicalities, have specialised it. It is much the same with politcs, professionalised bij democracy. No longer can one man hope to exercise both callings, though both are branches of the same craft, the governance of men and the ordering of human affairs." *The Good Soldier*, h. 27-28).

Kelima, kalau kita mengupas pula dasar-dasar perwakilan jang lain jang dipakai Sukarno dalam memilih anggota-anggota "Dewan Nasional"-nja, seperti wakil "pemuda" dan wakil "wanita" umpamanja, maka djelaslah bahwa "konsepsi" Sukarno ini memang suatu "konsepsi" jang mengamuk! Karena bagaimanakah orang bisa memakai dasar-dasar jang demikian kabur dan kurang tegasnja sebagai dasar perwakilan dari suatu dewan kenegaraan? Bagaimanakah orang bisa memilih

dengan adil wakil dari "pemuda" atau wakil dari "wanita" itu? Dan kalau djenis (sex) dan umurpun mendjadi dasar dan bukan hanja salah satu sjarat perwakilan, apakah kita akan mendapat pula wakil-wakil dari "orang tua" dan... "kanak-kanak?" Akibat dari pada pemakaian bermacam-macam dasar perwakilan jang tidak dapat ditegaskan ini ialah, pertama, tidak adil, karena memberikan perwakilan berganda kepada sesuatugolongan jang mengakibatkan kerugian kepada golongan jang lain; kedua, membuat perkembangan politik dalam masjarakat kita tak bisa lagi diperhitungkan lebih dahulu walaupun dalam garis-garis besarnja sadja. Anasir-anasir kepastian dalam perkembangan politik, jang membuatnja bisa diperhitungkan dan diterka lebih dahulu adalah penting sekali bagi kehidupan masjarakat demokrasi jang aman tenteram dan makmur. Bila orang tidak bisa mengetahui lagi apa jang akan terdjadi diminggu depan, maka lenjaplah segala harapan kepada masa jang akan datang, malaslah orang membuat rentjana-rentjana kedepan, dan tenggelamlah masjarakat dalam suasana lesu dan masa-bodoh.

Dengan dipakainja dasar-dasar perwakilan jang tiada keruan ini maka terubuktilah buat kesekian kalinja kekatjauan paham Ir. Sukarno mengenai falsafah demokrasi, karena dalam demokrasi modern soal pokok jang terpenting sekali jang tidak boleh disalah-pahami ialah soal perwakilan, karena *demokrasi modern* dengan sendirinja adalah suatu *demokrasi perwakilan*. Ribuan

tahun jang silam, seperti di Republik Athena dan di Republik Sparta jang berdaerah sempit dan berpenduduk sedikit, demokrasi dapat didjalankan dengan langsung dimana setiap rakjat, setjara bergilir, dapat duduk dalam dewan-dewan pemerintahan. Tetapi dizaman kita ini, lebih-lebih di negara kita sendiri, demokrasi jang langsung itu tidak dapat didjalankan lagi karena kebanyakan penduduk dan keluasan daerah. Maka dengan sendirinja suatu pemerintahan demokrasi dizaman kita ini mestilah djuga suatu pemerintahan dengan perwakilan. Oleh karena itu maka soal dasar perwakilan dan tjara-tjara memilih wakil itu adalah inti dari persoalan demokrasi modern. Ada atau tidaknja demokrasi jang sehat dalam sesuatu negara ditentukan oleh dasar perwakilannja, tjara-tjara memilih wakilnja, tjara-tjara wakil-wakil itu membuat keputusan mereka; dan bukan hanja oleh adanya pemilihan-pemilihan umum, parlemen, dan sebagainya, karena pemilihan-pemilihan dan parlemen-parlemen itu masih sadja dapat dipakai sebagai topeng belaka untuk menutup maksud-maksud jang tidak sesuai dengan demokrasi, dengan mempergunakan bermacam-macam pengendalian dalam masa melakukan pemilihan itu, sebagaimana biasanja dilakukan di negara-negara komunis dan fasis. "Memutuskan untuk memberi hak bersuara kepada seluruh rakjat," kata Edouard Laboulaye, "melakukan pemilihan umum seumum-umumnja, mempersatukan segala kekuasaan dalam satu dewan, ini tidak lain dan tidak bukan, melainkan kembali kepada kebiasaan dewan Konstitutante (abad ke delapan-belas); ini sekali lagi

memberikan sebagian kedaulatan kepada negara, tetapi semua ini tidaklah memberikan kemerdekaan kepada rakjat." ("Décréter le suffrage universel, introduire partout l'élection, concentrer le pouvoir dans une assemblée, c'était rentrer purement et simplement dans les traditions de la Constituante; c'était encore une fois donner au pays une part de la souveraineté, mais non pas la liberté." *L'État et Ses Limites*, h.47).

Sesuai dengan tudjuan-tudjuan demokrasi, maka dasar perwakilan jang sewadjarnja ialah *kepentingan* rakjat sebagaimana dinjatakan oleh lingkungan alam tempat kediaman mereka, yakni daerah mereka, karena kepentingan rakjat lebih banjak dipengaruhi oleh lingkungan daerah kediaman mereka, dari pada oleh kepertaian atau pekerdjaan mereka. Oleh karena kepentingan rakjat itu berbeda-beda dan bermacam-macam, maka mendjadi tugas sistem perwakilanlah untuk memungut, mengumpulkan, dan mempersatukan semua kepentingan, semua pendapat, semua pikiran, semua alasan, semua perasaan jang hidup berserak-serak dalam masyarakat jang maha luas itu, untuk dipergunakan dalam mendjalankan kebidjaksanaan pemerintahan negara. Njatalah dalam suatu negara dimana kepentingan-kepentingan, pendapat-pendapat, pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaan ini dikumpulkan hanja untuk dibunuh lagi dalam parlemen dengan pedang suara terbanjak, jang tentu sadja diajun oleh kepentingan golongan terbanjak itu pula, sebagai halnja dalam negara kesatuan

Indonesia, jang Insja Allah akan kita buktikan kelak, maka dalam suatu negara jang demikian, "pemilihan-pemilihan". dan "perwakilan-perwakilan" itu hanja merupakan sandiwara belaka, suatu topeng jang menjembunjak keadaan jang sebenarnja: satu pemerintahan jang sewenang-wenang dari satu golongan jang terbanjak atas golongan-golongan lainnja. Kupasan jang lebih landjut mengenai hal ini akan kita kemukakan kelak pada tempatnja.

Djadi njatalah bahwa "konsepsi" Sukarno itu bukan sadja tidak membawa penjelesaian terhadap kesulitan-kesulitan jang telah diakibatkan oleh kesalahan politik Sukarno sendiri selama 13 tahun jang silam, tetapi malah semakin menjeret negara dan bangsa kita kedjurang politik jang sesat jang kalau dibiarkan djuga achirnja akan meruntuhkan dasar-dasar demokrasi dan negara ber-Undang Undang Dasar dibumi Indonesia. Kita mengharapkan sadja semoga Sukarno tidak memerlukan 13 tahun lagi pula hanja untuk mengetahui hal ini.

III

DJAWABAN PENULIS DAN ALASAN-ALASANNJA

Kalau pendapat Sukarno tentang letaknja kesalahan-kesalahan jang telah terdjadi itu tidak benar, maka apakah dan dimanakah sebenarnja kesalahan-kesalahan itu? Menurut pendapat penulis, kesalahan-kesalahan itu terletak pada dua soal pokok jang penting sekali, dan kedua-duanja adalah akibat jang langsung dari politik Sukarno selama ini. *Pertama, falsafah atau ideologi negara tidak berdasarkan pada falsafah atau ideologi rakjat; kedua pemaksaan negara kesatuan atas satu bangsa bersuku.*

A. Falsafah atau ideologi negara tidak berdasarkan pada falsafah atau ideologi rakjat

Hal ini telah terdjadi sebagai akibat dari pada pembuangan Islam dan pemakaian pantjasila sebagai dasar falsafah atau "ideologi" negara. Terlepas dari nilainja pantjasila sebagai suatu "falsafah" atau sebagai suatu "ideologi" jang mana akan kita bitjarakan kelak, pantjasila bukanlah suatu "falsafah" atau suatu "ideologi" jang telah hidup dalam masjarakat Indonesia. Sebaliknja Islam adalah

suatu falsafah, suatu ideologi, suatu agama jang sudah hidup dan sudah berakar dalam masyarakat rakjat Indonesia. Selama lebih 90% rakjat Indonesia masih beragama Islam, maka selama itu pulalah falsafah hidup dan ideologi masyarakat Indonesia, buat 90%, akan tetap Islam. Inilah adalah suatu pengakuan terhadap kenyataan seadanya dan bukan hanya didasarkan atas angka terbanjak. Pengakuan terhadap kenyataan ini tidaklah berarti suatu tekanan atau hambatan terhadap hak hidup agama-agama lain di Indonesia.

Apakah hubungannya falsafah atau ideologi negara dengan tegakruntuhnya sesuatu negara? Negara dan pemerintahan adalah suatu kekuasaan moral, suatu kekuasaan jang bersandarkan pada ahlak dan kebaikan-kebaikan dari masyarakat jang mempunyai negara dan pemerintahan itu. Suatu negara tidaklah bisa ditegakkan atas dasar kekerasan semata-mata dengan tidak ada sokongan nilai-nilai moral dari masyarakat jang mendukungja. Negara dan pemerintahan tidaklah membuat masyarakat, tetapi masyarakatlah jang membuat negara dan pemerintahan itu. Sebelum adanya negara dan pemerintahan Indonesia mestilah lebih dahulu sudah ada masyarakat Indonesia jang kemudian melahirkan negara dan pemerintahan Indonesia, sebagai *alat dari masyarakat* untuk mentjapi kesempurnaan masyarakat Indonesia, lahir dan batin, ruhani dan djasmani, dunia dan akhirat, menurut moral, budi-pekerti dan falsafah hidup masyarakat Indonesia sendiri, jang buat 90% Islam itu.

Kita ulangi: negara dan pemerintahan adalah alat dari masyarakat dan bukanlah sebaliknya. Awaslah kepada orang-orang jang hendak mengorbankan masyarakat untuk apa jang disebutnja "kepentingan negara", karena negara dan pemerintahan tidaklah mempunyai kepentingannya sendiri terlepas dari kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam suatu negara demokrasi, falsafah atau ideologi negara mestilah mengikuti falsafah atau ideologi masyarakat jang melahirkan dan mendukung negara itu. Bila tidak demikian, maka pertama sekali, negara itu sudah menjimpang dari dasar demokrasi; dan kedua, negara dan pemerintahan itu tidak akan mendapat penghargaan, kesetiaan dan ketaatan dari anggota-anggota masyarakat jang telah melahirkan dan mendukungja, jang pada akhirnya akan membawa kepada keruntuhan negara itu sendiri.

Disini kelihatanlah betapa rapatnja hubungan antara suatu negara dengan ideologi dan falsafah hidup, atau lebih tegas lagi, dengan agama jang dianut oleh masyarakatnja. Dalam bukunya, *Pengakuan Seorang Revolusioner*, Proudhon telah menulis, "sangatlah mengherankan bahwa pada dasar tiap-tiap politik kita, kita selamanya mendapati ilmu ketuhanan." ("Il est surprenant qu'au fond de notre politique, nous trouvons toujours la theologie." *Confession d'un Revolutionnaire*, h.61). Dan Donoso Cortès, jang mengatakan: "Kebenaran keagamaan adalah djuga kebenaran politik dan kebenaran

sosial karena kebenaran keagamaan itu adalah kebenaran jang sempurna." ("La vérité religieuse est, en même temps, la vérité politique et la vérité sociale parce qu'elle est la vérité complète." *Œuvre*, djilid II, h. 198). Tetapi kita masih djuga mempersaksikan suatu permainan dimana masjarakat Indonesia Islam tidaklah melahirkan suatu negara jang ber-falsafah Islam, tetapi suatu negara jang ber "falsafah" pantjasila. Perbandingannja, kalau pematja memaafkan, tidak obahnja seperti seekor lembu jang melahirkan anak keledai. Pendjelasannja barangkali hanja dapat diberikan oleh satu orang. "Dr." Sukarno jang bertindak sebagai bidannja.

Sebagai akibat dari pada tidak dipakainja falsafah dan ideologi rakjat-Islam-mendjadi falsafah dan ideologi negara, maka Republik Indonesia tidak lagi bersifat suatu kekuasaan moral jang mendasarkan kekuasaannya pada nilai-nilai dari masjarakat jang telah melahirkannja. Inilah sebabnja maka kewibawaan pemerintah Sukarno berangsur hilang; pemerintahannja penuh korupsi, ketidak-adilan, dan achirnja pemberontakan rakjat jang tiada sanggup lagi menderita. Ahli-ahli ilmu masjarakat jang telah mempeladjadi keadaan Indonesia dewasa ini sependapat bahwa kebobrokan pemerintah Sukarno adalah disebabkan ketiadaan penghargaan rakjat kepadanya. Mengenai korupsi jang meradjalela, Professor Wertheim telah menulis dalam bukunnja *Masjarakat Indonesia dalam Peralihan*, "pada dasarnya korupsi adalah suatu tanda pertentangan kesetiaan jang terutama sekali

menundjukkan kepada kekurangan kesajangan jang sungguh-sungguh kepada pemerintah dan tjita-tjitanja. Sebegitu djauh korupsi menundjukkan bahwa pemerintah baru... masih renggang dengan masjarakat dan tidak dapat menerbitkan rasa simpasi jang penuh, rasa ingin membantu jang sungguh-sungguh, dan kesetiaan jang tidak mengenal kegagalan dari rakjat dan pegawai-pegawai; ini adalah suatu tanda kelemahan dari pada susunan politik jang sekarang." ("Corruption is essentially a sign of conflicting loyalties pointing primarily to a lack of positive attachment to the government and its ideals. In so far as corruption shows that the new government... is not yet sufficiently integrated in society and does not evoke full sympathy, enthusiasm and unflinching loyalty from subjects and officials, it is a sign of weakness of the present political structure." *Indonesian Society in Transition*, h. 86). Seorang ahli ilmu politik jang lain, J. M. van der Kroef, telah menulis pula bahwa kekatjauan di Indonesia adalah disebabkan oleh persoalan ideologi jang mendalam. Dikatakannja bahwa kekatjauan di Indonesia adalah suatu pendjelmaan dari krisis djiwa jang miskin, didorong oleh rasa ketiadaan tempat berpegang dan perpetjahan masjarakat jang sedang mengalami suatu perobahan jang berbahaja mengenai nilai-nilai peradaban. ("But Indonesia's unrest has deeper ideological cause. It is the expression of a profound spiritual malaise, a sense of purposelessness and societal incohesion, a dangerous shifting of cultural values..." *Indonesia in the Modern*

World, h. 198). Terhadap tindjauan ini penulis ingin menambah bahwa jang sedang mengalamikrisiskemiskinan djiwa dan ketiadaan tempat berpegang itu bukanlah *masjarakat* Indonesia, sekali-kali bukan, tetapi hanya beberapa orang jang telah berkesempatan mengambil kekuasaan negara dan memeralatkannja untuk menentang falsafah jang hidup dan nilai-nilai *masjarakat* Indonesia sendiri, Sukarno adalah pemuka dari djiwa-djiwa jang bingung ini jang dengan serta merta, dengan tiada persetudjuan dari *masjarakat*, telah menuliskan pantjasil-anja dalam Undang Undang Dasar Sementara sebagai "ideologi" negara. Dengan demikian Sukarno telah menanam bibit perpetjahan dalam Undang Undang Dasar dan mendjadikan Undang Undang Dasar Republik Indonesia itu suatu "piagam perselisihan" dari awal sampai ke achirnja. Pada hal semestinja Undang Undang Dasar itu adalah suatu "piagam persatuan".

Dalam alam demokrasi, Undang Undang Dasar tidaklah dapat dipakai sebagai tempat untuk menulis dan menjebarkan ideologi atau falsafah baru; Undang Undang Dasar adalah tempat menulis dan *mengikrarkan* ideologi atau falsafah jang sudah hidup, jang sudah tersebar dan jang sudah diterima oleh sebagian jang terbesar sekali dari *masjarakat*. Undang Undang Dasar, sebagai ditunjukkan oleh namanja sendiri, berarti ketentuan-ketentuan hukum jang kalau perlu pelaksanaannja dapat dipaksakan dengan kekerasan sendjata. Undang Undang Dasar adalah suatu alat kekuasaan. Oleh Karena itu

mereka jang mentjoba mempergunakan Undang Undang Dasar sebagai alat untuk menjebarkan pikirannja jang belum diterima *masjarakat*, samalah dengan memaksa *masjarakat*, dengan antjaman sendjata, buat menerima pendapat-pendapat pribadinja. Bahwa perbuatan-perbuatan jang gegabah dari "nabi-nabi" palsu ini akan menemui kegagalan, tidaklah dapat diragu-ragukan. Tetapi jang sajangnja ialah perbuatan-perbuatan jang demikian itu hanya akan menimbulkan pertentangan-pertentangan jang pada achirnja akan meruntuhkan negara itu sendiri, dan jang akan menderita rakjat djuga.

Djaranglah kita melihat dalam dunia demokrasi pemakaian Undang Undang Dasar seserong perbuatan Sukarno dengan Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia di Djakarta. Bahkan Magna Carta, suatu Undang Undang Dasar jang tertua didunia, jang ditanda-tangani oleh Radja Inggeris di tahun 1215 itu, tidaklah keluar dari ketentuan-ketentuan diatas. Magna Carta, walaupun betapa modernnja pada zamannja, tidaklah berisikan sesuatu hal jang baru, atau mengemukakan sesuatu falsafah baru kepada rakjat Inggeris. Apa jang dilakukan oleh Magna Carta sebagai suatu Undang Undang Dasar tidak lain hanjalah menuliskan, hitam diatas putih, apa jang jang sebelumnja sudah lebih dahulu mendjadi persetudjuan bersama diantara bangsa Inggeris.

Dalam pada itu Islam mempunjai kedudukan jang istimewa sekali dalam kehidupan kebangsaan

Indonesia karena Islam-lah *satu-satunja* kekuatan jang mempersatukan bahagian jang terbesar sekali dari bangsa-bangsa Indonesia jang alamnja, sedjarahnja, bangsanja, bahasanja, kepentingan ekonominja, politiknja, dan adat-istiadatnja tidak pernah mengenal kesatuan itu.

Alam Indonesia jang terdiri dari empat kepulauan raksasa dan ribuan kepulauan lain-lain itu, njata-njata tidaklah menundjukkan kesatuan sehingga sebenarnya tidaklah perlu kita perbintjangkan disini. Tetapi kita masih ingat Sukarno pernah mengatakan bahwa anak ketjilpun tahu bahwa kepulauan Indonesia itu merupakan satu kesatuan. "Alasan" Sukarno ini memang benar, karena kanak-kanak jang masih ketjil, jang masih belum berkesempatan mempeladjar ilmu-bumilah jang bisa "menjetudju" pendapat Sukarno ini. Kalau pemimpin-pemimpin Amerika Serikat, umpamanja mempunyai paham ilmu-bumi sebagai Sukarno tentulah mereka sudah lama menduduki Canada, Mexico dan semua negara-negara ketjil disebelah utara Terusan Panama dengan alasan jang sama pula; tentulah dengan "alasan" itu pula pemimpin-pemimpin Tiongkok sudah lama menduduki negara-negara Asia Tenggara; Spanjol sudah bisa "menelan" Portugis, India bisa "menelan" Ceylon, dan sebagainya. Sjukurlah pandangan ilmubumi jang begitu mentahnja ini hanja mendjadi anutan Sukarno sendiri sadja.

Demikian pula kebangsaan Indonesia tidaklah mengenal kesatuan: bangsa Indonesia bukanlah suatu bangsa jang tunggal, tetapi suatu bangsa bersuku, jang

masing-masing mempunyai bahasanja sendiri-sendiri pula. Bahasa-bahasa Bugis, Minangkabau, Batak, Atjeh, Sunda, dan lain sebagainya, bukanlah hanja "dialects" dari bahasa Melaju, tetapi adalah bahasa bahasa dalam artian jang sesungguhnya. Sebagaimana bahasa Perantjis, Spanjol, Portugis dan Italia tidak dapat disebut hanja sebagai "dialects" dari bahasa Latin, maka demikian pula bahasa-bahasa Batak, Bugis, Atjeh, Sunda, dan sebagainya itu, tidaklah dapat disebut hanja sebagai "dialects" dari bahasa Melaju. Betul bahasa-bahasa ini mempunyai saut rumpun dengan bahasa Melaju, tetapi bahasa-bahasa ini sudah merupakan tjabang-tjabang jang berdiri sendiri, tjukup dengan saraf dan seni-bahasanja. Apalagi bahasa Djawa jang mungkin atau tidaknja digolongkan dalam bahasa-bahasa Melaju masih dapat diperdebatkan.

Demikian pula sedjarah Indonesia, dan jang kita maksudkan disini ialah sedjarah dalam artian jang sesungguhnya, bukan dongeng dan bukan fantasi, -tidaklah pernah mengenal kesatuan. Semua negara-negara kita jang sudah-sudah, besar dan ketjil, adalah negara-negara keradjaan jang dipunjai oleh masing-masing suku-suku bangsa jang bersangkutan. Keradjaan-keradjaan besar kita dimasa jang silam seperti Sriwidjaja, Madjapahit, Padjadjaran, Bugis, Mataram, Atjeh, Pagarrujung, dan sebagainya, masing-masing hanja menguasai bahagian-bahagian dari kepulauan kita dan tidak pernah keseluruhannja. Tjerita-tjerita jang sering diperdengarkan bahwa keradjaan Sriwidjaja pernah menguasai seluruh Indonesia adalah lebih banjak bersifat dongeng dari pada

keadaan jang sesungguhnya. Tulisan tulisan dari G. Coedes dalam bukunya, *Les états hindouises d'Indochine et d'Indonesie* dan tulisan G. Ferrand dalam bukunya *L'empire Sumatranais de Crivijaya*, jang sering dipakai untuk menguatkan tjerita-tjerita tersebut, tidaklah memberikan bukti-bukti sedjarah jang meyakinkan, walaupun kita ingin mempertajainja. Karena ini pula, maka sebagian besar ahli-ahli sedjarah meragu-ragukan kebenaran tjerita penulis-penulis tersebut.

Sering pula dikemukakan se-akan-akan keradjaan Madjapahit pernah menguasai seluruh Indonesia. Inipun tjerita-tjerita jang sebegitu djauh belum dapat dibuktikan dengan kenyataan-kenyataan sedjarah. Di Djawa sadja, umpamanja, keradjaan Padjajaran dari Pasundan tidaklah pernah tunduk kepada Madjapahit. Di Sumatera, keradjaan Atjeh jang sudah lebih dahulu berdirinja dari keradjaan Madjapahit dan jang terus hidup sesudah Madjapahit djatuh itu, tidaklah pernah dikuasai Madjapahit. Kita tidak mempunjai bukti-bukti sedjarah jang membuktikan sebaliknya. Sebenarnya keradjaan Atjeh tidak pernah djatuh-djatuh sampai tardjadinja peperangan 50 tahun dengan Belanda jang dimulai pada tahun 1870 itu. Seorang ahli sedjarah, Dr. C. C. Berg, dalam karangannja, "De Sadeng Oorlog en de mythe van Groot Majapahit," (Perang Sadeng dan dongeng Madjapahit Raja), jang diterbitkan dalam madjallah *Indonesie* (djilid 5, 1951/52, h. 385 dan seterusnya) telah menundjukkan betapa kurangnya kenyataan-kenyataan

sedjarah jang dapat membuktikan bahwa Madjapahit pernah mengoasai seluruh Indonesia. Ia berpendapat Madjapahit paling banjak hanja menguasai Djawa, Madura dan Bali sadja. Demikian pula tjerita-tjerita Prapanca dalam hikajatnja *Negarakertagama* terbukti lebih banjak bersifat hikajat dari pada sedjarah.

Suatu hal jang tidak bisa diabaikan dalam memahami sedjarah ialah bahwa keradjaan-keradjaan besar itu, timbul dan tenggelamnja tidaklah terdjadi dengan kebetulan atau dengan diam-diam sadja. Timbulnja keradjaan-keradjaan besar mestilah berdasarkan pada adanya anasir-anasir kekuasaan, jakni, sumber kekuatan ekonomi dan kesanggupan untuk mendjelmakannja mendjadi kekuatan ekonomi jang njata-njata; adanya djalan-djalan perhubungan jang luas, lautan dan daratan, jang memungkinkan perdagangan disatu pihak dan memungkinkan penguasaan dilain pihak; keadaan demography (perbandingan antara djumlah penduduk dengan luas tanahnja sesuatu negara); sifat dan semangatnja sesuatu bangsa. Demikian pula djatuhnja keradjaan-keradjaan besar pastilah meninggalkan bekas-bekas jang njata jang dapat diselidiki di bekas-bekas daerah djadjahannja. Tetapi kebanyakan anasir-anasir kekuasaan diatas tidaklah terdapat pada Sriwadjaja atau Madjapahit. Terbukti pula kedua-duanja tidaklah meninggalkan bekas-bekas sebagai kekuasaan besar jang meliputi seluruh Indonesia.

Memang sudahlah mendjadi tabiat manusia untuk

mentjari zaman keemasannya dalam kegelapan masa jang sudah silam, jang tak dapat dirangkau lagi itu, djadi dapat dichajalkan sesuka hati, dengan perasaan jang tenteram, karena diketahui takkan ada orang jang bisa membuktikan kebalikannya. Tetapi mestikah kita menganggap nenek mojang kita sebagai "supermen", sedang kita sendiri sebagai sangat rendah? Tidak. Kalau sedjarah mempunyai satu petua kepada kita, maka petua itu ialah: kita tidaklah perlu memakai masa jang silam sebagai tempat melarikan diri dari menghadapi kenjataan masa sekarang, betapapun tidak menjenangkannya. Nenek mojang kita bukanlah "supermen" sebagaimana kitapun bukanlah terlalu lemah. Kita adalah keturunan mereka, karena itu kitapun kurang-lebih sama dengan mereka itu. Maksud dari sedjarah bukanlah untuk memberikan suatu tjontoh dari kesempurnaan — jang tidak pernah ada itu, — tetapi untuk memberikan kepada kita kesempatan buat beladjar dari kesalahan-kesalahan jang sudah lalu.

Dengan menempatkan keradjaan-keradjaan lama kita pada tempatnja jang sebenarnya, dengan tidak melebih-lebihkannya, kita tidaklah bermaksud mengurangi arti kedudukan keradjan-keradjaan itu dalam sedjarah kita: Semua keradjan-keradjaan lama kita itu, lebih-lebih Sriwidjaja dan Madjapahit, pantaslah mendjadi kebanggaan suku-suku bangsa jang mempunjainja. Bahkan Sukarno sendiri waktu dia berbitjara di Amerika telah membanggakan keradjaan Madjapahit itu, bukan sebagai

suatu keradjaan Indonesia, tetapi sebagai satu keradjaan Hindu Djawa! Memang demikianlah jang sebenarnya. Tetapi gandjilnja kalau didalam negeri Sukarno tidak pernah mau berterus-terang.

Djadi njatalah, sebelum pendjadjahan Belanda kita tidak pernah mempunyai kesatuan sedjarah. Pun dalam pendjadjahan Belanda pada hakikatnja kita tidaklah mempunyai kesatuan sesjarah itu: ada daerah-daerah jang didjadjah Belanda sampai ratusan tahun, seperti Djawa umpamanya, ada jang lebih singkat dari itu, seperti umumnya daerah-daerah diluar Djawa, dan ada jang hanya beberapa puluh tahun sadja seperti Atjeh, umpamanya. Pendjadjahan Belanda tidak mengubah sifat kebangsaan Indonesia jang bersuku itu. Dan kesatuan Indonesia tidaklah dapat didasarkan atas kesatuan pemerintahan "Hindia Belanda", karena pemerintahan "Hindia Belanda" sendiri tidaklah didirikan atas dasar hukum, tetapi atas dasa perampasan kekuasaan jang diluar hukum dari keradjaan-keradjaan Indonesia lama. Suatu negara hukum tidaklah dapat didirikan atas suatu negara lain jang bukan berdasarkan hukum. Ketika Belanda menjerah, maka kedaulatan jang sesungguhnya di Indonesia dengan sendirinja kembali kepada masing-masing bangsa-bangsa Indonesia dari siapa kedaulatan itu dahulunya sudah dirampas oleh Belanda, dan merekalah jang mempunyai hak menentukan nasib diri sendiri untuk memilih bentuk negara apapun jang mereka kehendaki, dimasa sekarang dan dimasa jang akan datang.